

REFERENSI

No. 06/ref.PKA/APBN/V/2019

Perkembangan Utang
Pemerintah Pusat

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERKEMBANGAN UTANG PEMERINTAH PUSAT

Jesly Yuriaty Panjaitan, SE, MM
Matius Winarno, SE, MAB
Deasy Dwi Ramiayu, S.E. *)

Utang Pemerintah Pusat merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (*debt refinancing*). Landasan hukum pengelolaan utang antara lain :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN.

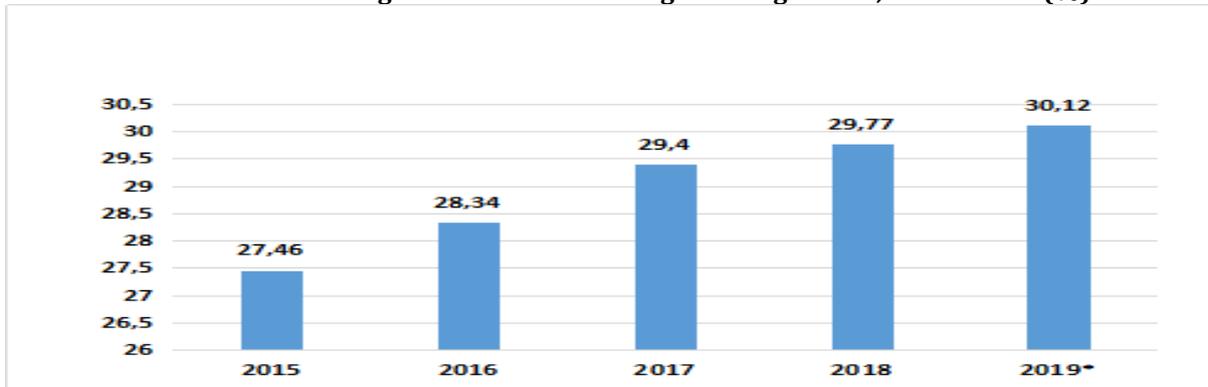
A. BATASAN UTANG DAN DEFISIT ANGGARAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan batasan defisit anggaran maksimal 3% dan batasan utang maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran tersebut merupakan adopsi dari *Maastricht Treaty* yaitu perjanjian dalam rangka pembentukan Uni Eropa yang ditandatangani pada 7 Februari 1992. Perjanjian tersebut mengatur tingkat inflasi, pengelolaan keuangan pemerintah (defisit tahunan dan utang pemerintah), nilai tukar dan tingkat suku bunga jangka panjang. Rasio utang terhadap PDB di 2018 sebesar 29,77% relatif naik dari 27,46% pada 2015. (Gambar 1). Sedangkan, rasio defisit anggaran terhadap PDB di 2018 sebesar 1,76% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2,59 %. Pemerintah kembali melakukan konsolidasi fiskal pada 2018 dan 2019 sehingga defisit berada di bawah 2%.

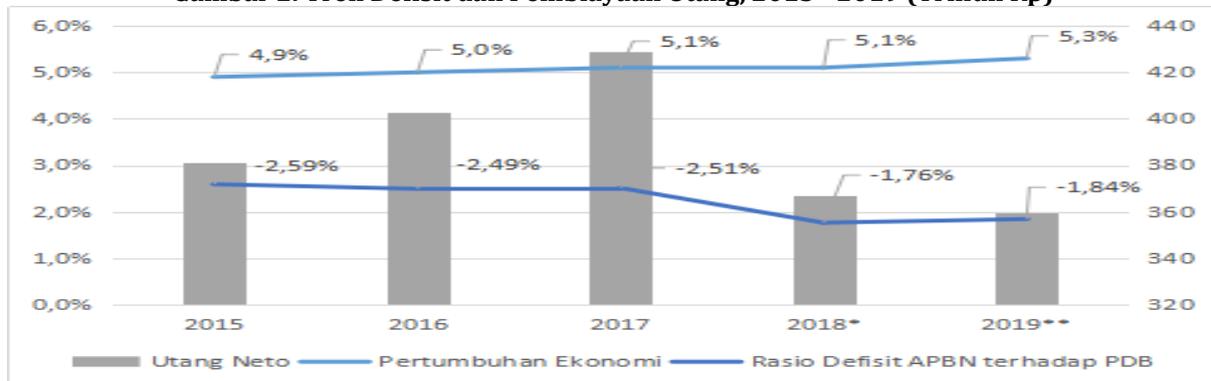
*)Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Dengan adanya stimulus yang diberikan, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9% di 2015 menjadi 5,2% di 2018. (Gambar 2)

Gambar1. Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB, 2010 - 2019 (%)



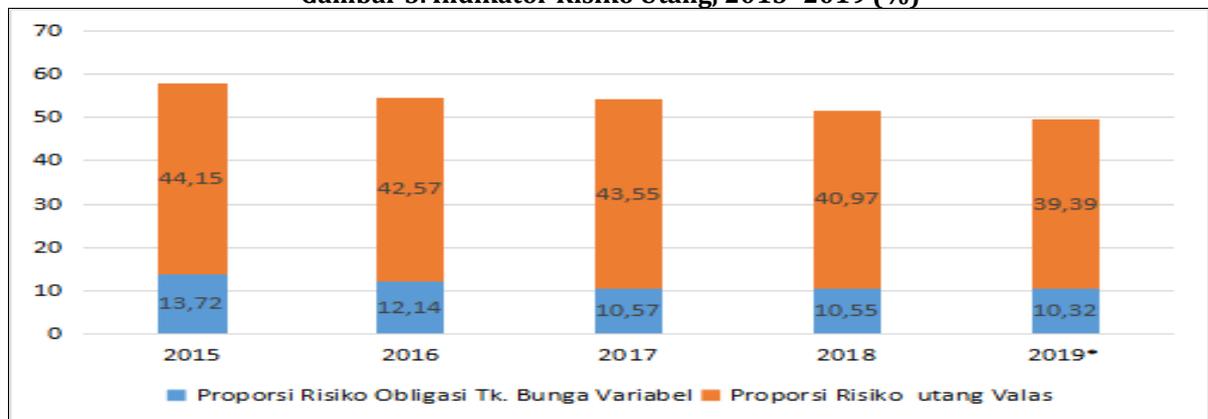
Gambar 2. Tren Defisit dan Pembiayaan Utang, 2013 - 2019 (Triliun Rp)



Sumber: Kementerian Keuangan
 *2018 realisasi sementara, **2019 APBN

Risiko tingkat bunga terus menurun dari 44,15% di tahun 2015 menjadi 39,39% pada Maret 2019 seiring penurunan porsi utang dengan tingkat bunga variabel. (gambar 3). Disamping itu, risiko valuta asing juga makin terkendali dengan penurunan porsi utang dalam denominasi mata uang asing dari sebelumnya sebesar 13,73% pada tahun 2015 menjadi sebesar 10,32% di Maret 2019.

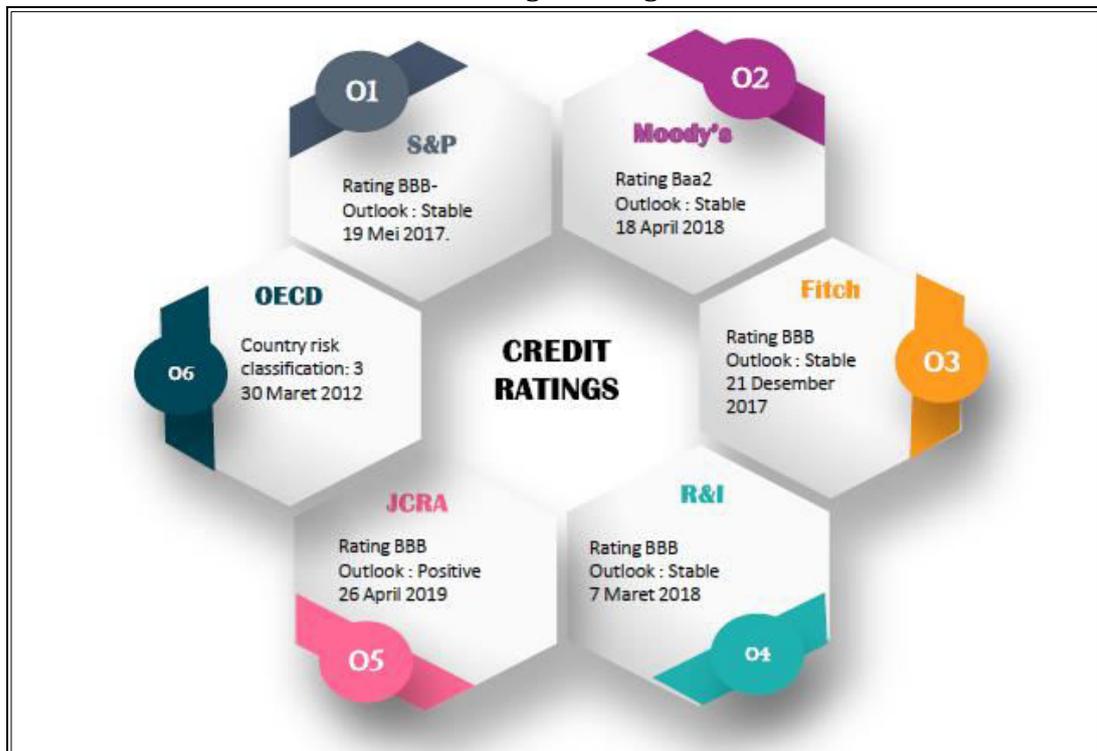
Gambar 3. Indikator Risiko Utang, 2015- 2019 (%)



Sumber: CEIC, Kementerian Keuangan
 *Sampai Dengan Maret 2019

Sampai dengan Maret 2019, tiga lembaga pemeringkat utama dunia memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia sebagaimana Standard & Poor's, Moodys Investor Service, dan Fitch memberikan rating BBB dengan outlook *stable* pada 19 Mei 2017, Moodys Investor Service memberikan rating Baa2 dengan outlook *stable* pada tanggal 18 April 2017, dan Fitch Ratings memberikan rating BBB dengan outlook *stable* pada tanggal 21 Desember 2017. Disamping itu, lembaga pemeringkat internasional lainnya seperti R&I memberikan rating BBB dengan outlook *stable* pada tanggal 7 Maret 2018 dan JCRA memberikan rating BBB dengan outlook *stable* pada tanggal 26 April 2018. Peringkat utang Indonesia mencerminkan pengakuan atas kemampuan Indonesia dalam membayar kembali komitmen utang yang telah disepakati.

Gambar 4. Peringkat Utang Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan

B. KOMPOSISI UTANG

B.1. Komposisi Utang Berdasarkan Sumber

Hingga Maret 2019, sebanyak 83,7% portofolio merupakan utang kepada lembaga keuangan komersial (termasuk di dalamnya SBN domestik, SBN Valas, serta Pinjaman Dalam Negeri dan Kredit Luar negeri Komersial) dan 16,3% berasal dari kerjasama bilateral seperti Jepang dan lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB. (Gambar 5).

Gambar 5. Komposisi Utang Pemerintah Pusat (Triliun Rp)

NEGARA	2015	2016	2017	2018	Per Maret 2019 *)	
					Nominal	% Total
1. BILATERAL	340,63	315,07	314,46	330,95	322,26	7,1%
a. Japan	215,28	197,62	188,90	186,81	182,28	4,0%
c. Germany	22,29	24,72	27,92	41,92	40,44	0,9%
b. France	26,22	24,50	29,10	32,31	30,77	0,7%
d. South Korea	19,76	19,73	19,59	19,78	19,24	0,4%
e. Others	57,08	48,50	48,95	50,14	49,53	1,1%
2. MULTILATERAL	360,04	368,92	381,65	425,49	420,61	9,2%
a. Bank Dunia	221,78	231,93	243,26	264,64	257,22	5,6%
b. ADB	126,95	124,44	122,82	141,61	144,09	3,2%
c. IDB	8,62	9,88	12,31	15,27	15,04	0,3%
d. IFAD	2,08	2,22	2,55	2,62	2,55	0,1%
e. EIB	0,38	0,30	0,22	0,14	0,14	0,0%
f. NIB	0,23	0,16	0,15	0,15	0,14	0,0%
g. AIIB	0,00	0,00	0,32	1,07	1,43	0,0%
3. KOMERSIAL BANK	2.464,29	2.831,35	3.297,53	3.661,86	3.824,44	83,7%
a. Indonesia**	1.755,18	2.019,16	2.364,81	2.606,71	2.768,32	60,6%
b. International Organizations***	658,92	766,58	889,60	1.012,55	1.014,94	22,2%
c. Others	50,20	45,61	43,12	42,60	41,18	0,9%
4. SUPPLIERS	0,17	0,10	1,17	-	-	0,0%
TOTAL UTANG	3.165,13	3.515,46	3.994,80	4.418,30	4.567,31	100,0%

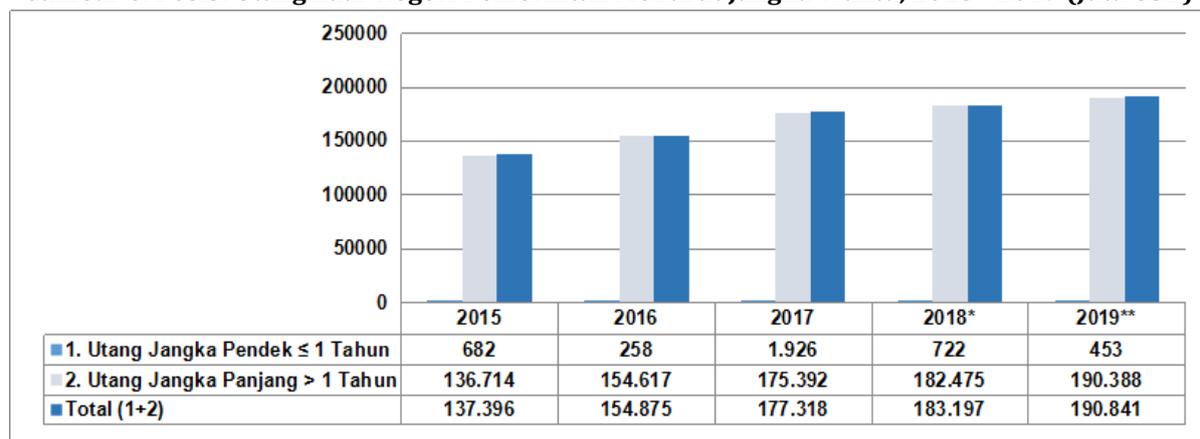
Sumber: Kementerian Keuangan

*) Sampai dengan Maret 2019; **) Termasuk SBN Domestik; ***) Termasuk SBN Valas

B.2. Komposisi Utang Berdasarkan Jangka Waktu

Posisi utang luar negeri pemerintah dari tahun ke tahun cenderung didominasi oleh utang jangka panjang berdurasi diatas 1 tahun. (Gambar 6). Baik utang jangka pendek maupun jangka panjang masing-masing terus mengalami tren peningkatan.

Gambar 6. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Jangka Waktu, 2015 - 2019 (Juta USD)



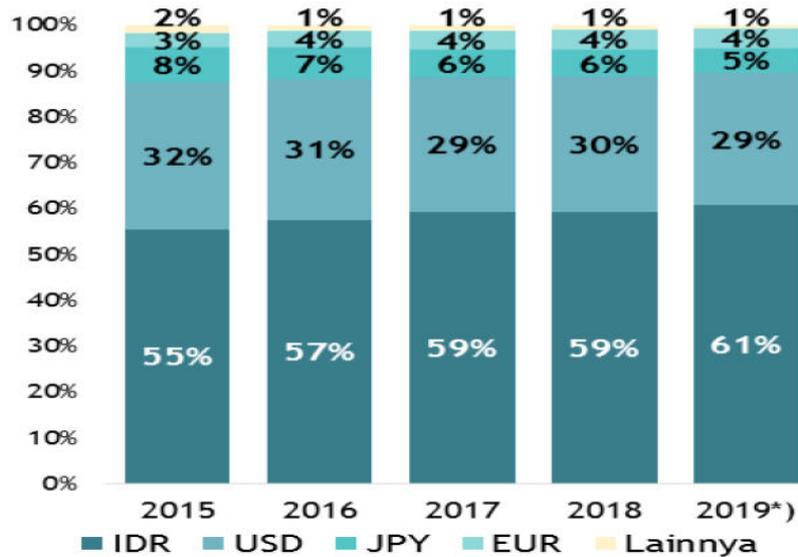
Sumber: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Vol X, April 2019

*Angka Sementara, ** Sampai Dengan Februari 2019

B.2. Komposisi Utang Berdasarkan Jenis Mata Uang

Berdasarkan posisi utang sampai dengan 31 Maret 2019, porsi portofolio utang dalam mata uang rupiah mendominasi sebesar 61%, dan diikuti dengan mata uang USD sebesar 29%, JPY sebesar 5%, EUR sebesar 4% dan mata uang lainnya sebesar 1% (Gambar 7).

Gambar 7. Komposisi Utang Pemerintah Pusat Menurut Jenis Mata Uang



Sumber: Kementerian Keuangan

Utang Luar Negeri yang sebagian besar dalam mata uang dolar AS sangat rentan dipengaruhi oleh pergerakan fluktuasi kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS, sehingga pada saat kurs rupiah terhadap dolar AS melemah, jumlah Utang Luar Negeri pun ikut meningkat.

Gambar 8. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Jenis Mata Uang, 2010-2019 (Juta USD)

No	Mata Uang	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	USD	68.351	74.618	82.406	87.696	90.124
2	JPY	17.657	17.708	17.929	17.676	17.734
3	SDR	2.499	2.176	2.040	1.730	1.670
4	GBP	267	161	141	97	101
5	EUR	6.554	9.150	11.501	13.001	12.897
6	CHF	126	87	71	82	81
7	IDR	40.487	49.554	61.717	61.684	67.041
8	SGD	-	-	-	-	-
9	CNY	227	190	178	147	151
10	MYR	-	-	-	-	-
11	KRW	192	187	206	189	289
12	HKD	-	-	-	-	-
13	THB	-	-	-	-	-
14	AUD	357	351	373	331	335
16	Lainnya	678	692	755	564	419
	TOTAL	137.396	154.875	177.318	183.197	190.841

Sumber: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Vol X, April 2019

*Angka Sementara, ** Sampai Dengan Februari 2019

B.2. Komposisi Utang Berdasarkan Sektor

Sampai dengan Februari 2019, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memperoleh alokasi pinjaman luar negeri negeri yang lebih besar dibandingkan dengan

sektor lainnya sebesar USD35.876 juta, selanjutnya disusul oleh sektor konstruksi sebesar USD32.055 Juta. (Gambar 9). Sektor-sektor yang memperoleh alokasi pinjaman dengan tren peningkatan sampai dengan Februari 2019 adalah Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan; Sektor Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan aktifitas Remediasi; Sektor Konstruksi; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Sementara, sektor yang memperoleh alokasi pinjaman dengan tren penurunan sampai dengan Februari 2019 adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

**Gambar 9. Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2010-2019
(Juta USD)**

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	8.872	9.827	10.678	10.474	10.452
2	Pertambangan & Penggalian	522	506	507	504	506
3	Industri Pengolahan	740	631	527	407	406
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara	3.501	3.657	4.012	4.050	4.070
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2.966	2.616	3.418	4.012	4.208
7	Konstruksi	19.780	22.593	30.353	31.332	31.045
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	229	177	127	81	82
9	Transportasi dan Pergudangan	8.368	7.817	9.942	11.213	11.802
10	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
11	Informasi dan Komunikasi	1.127	1.033	1.213	1.014	1.041
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.467	24.170	24.130	26.959	27.517
13	Real Estate	3	3	2	2	2
14	Jasa Perusahaan	10	9	9	8	8
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	19.693	24.089	24.476	25.553	28.896
16	Jasa Pendidikan	20.684	23.289	27.851	28.700	30.065
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.744	28.727	34.551	33.944	35.876
18	Jasa Lainnya	6.689	5.731	5.524	4.943	4.865
	TOTAL	137.396	154.875	177.318	183.197	190.841

Sumber: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Vol X, April 2019

*Angka Sementara, ** Sampai Dengan Februari 2019

C. JENIS UTANG

Menurut struktur APBN, utang pemerintah pusat terdiri dari Pinjaman dan Surat Berharga Negara. Pinjaman terdiri dari Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri. Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

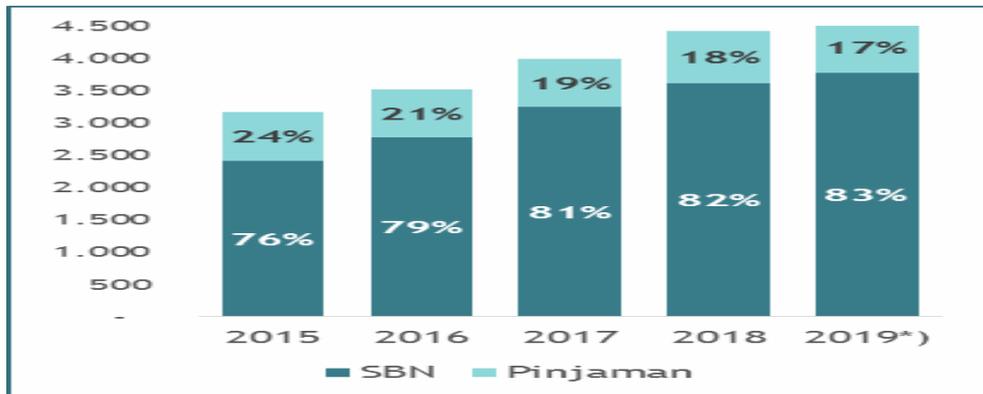
Gambar 10. Bagan Surat Berharga Negara



Sumber : NK dan APBN 2017

Dalam upaya mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah terus meningkatkan portofolio SBN dengan menerbitkan lebih banyak SBN daripada pinjaman. Berdasarkan posisi utang pemerintah sampai dengan 31 Maret 2019, komposisi instrumen pembentuk portofolio utang pemerintah berupa SBN senilai Rp3.776 triliun atau 83% dan Rp791 triliun atau 17% berasal dari instrumen pinjaman (Gambar 11).

Gambar 11. Komposisi Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Instrumen Tahun 2015 - 2019



Sumber: Kementerian Keuangan

C.1. SBN

Pembiayaan utang yang berasal dari instrumen SBN baik SUN dan SBSN sampai dengan Maret 2019 terus meningkat. Besaran utang pemerintah sampai dengan Maret 2019 terdiri atas Rp3.776,12 triliun dengan komposisi 82,68% terhadap total utang (Gambar 12). Pada SUN, portofolio obligasi negara terus meningkat hingga 2019 yang mendominasi sebanyak 96% dari total SUN sementara pembiayaan melalui SPN cenderung menurun di tahun 2018. Penerbitan SBN baik SUN maupun SBSN untuk 2019 masih dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek serta refinancing.

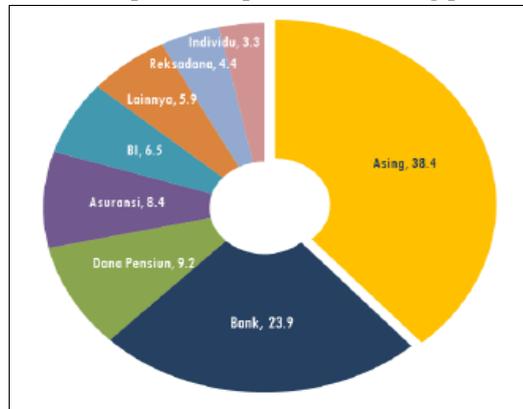
Gambar 12. Pembiayaan Utang Instrumen SBN Tahun 2013 – 2019 (dalam triliun Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019*
Surat Utang Negara (SUN)	1.327.436	1.531.491	1.770.683	1.988.217	2.117.473
Obligasi Negara	1.262.052	1.490.451	1.665.826	1.910.567	2.052.773
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	65.384	41.040	104.857	77.650	64.700
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	201.017	284.991	382.210	433.627	466.047

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Maret 2019

Komposisi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara sampai dengan Maret 2019 relatif tinggi yakni mencapai 38,4%. Disusul oleh perbankan sebesar 23,9%, dana pensiun sebesar 9,2%, asuransi sebesar 8,4%, BI sebesar 6,5%, reksadana sebesar 4,4%, Individu sebesar 3,3%, dan lainnya sebesar 5,9%. (gambar 13).

Gambar 13. Komposisi Kepemilikan Asing pada SBN (%)



Sumber: Kementerian Keuangan

Sampai dengan Maret 2019, total posisi SBN berdenominasi Rupiah sebesar Rp2.761,18 triliun atau sebesar 71% dari total SBN. Sementara SBN Valas sebesar Rp1.014,94 triliun atau 29% dari total SBN (gambar 14). Kepemilikan non Residen/Asing terhadap keseluruhan SBN sebesar Rp1.889,3 triliun atau 50% dari total SBN, berasal dari kepemilikan di SBN Valas Rp922,2 triliun dan SBN Rupiah tradable Rp967,1 triliun.

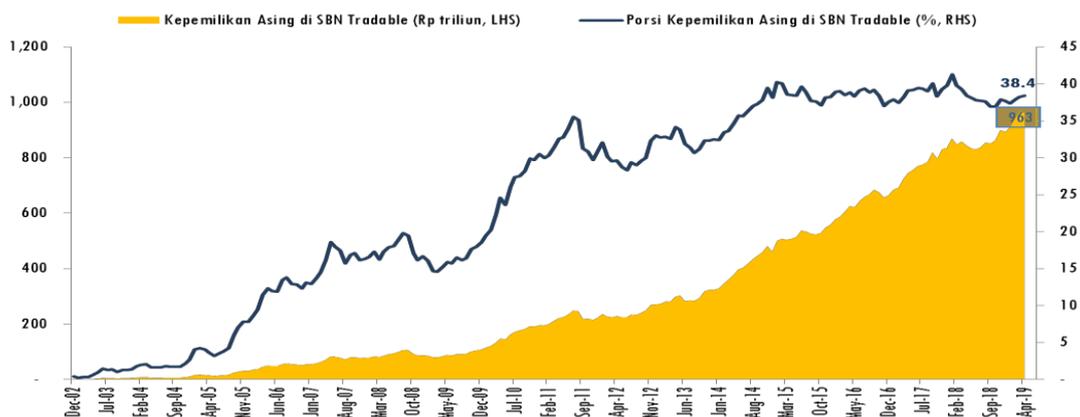
Gambar 14. Posisi SBN Denominasi Rupiah dan Valas Tahun 2019 (dalam triliun Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Komposisi
SBN Rupiah	2.761.180,47	71%
Residen	1.794.055,52	47%
Dapat Diperdagangkan	1.560.868,14	40%
Tidak Dapat Diperdagangkan	233.187,38	7%
Non residen	967.124,95	24%
SBN Valas	1.014.937,92	29%
Total Posisi SBN	3.776.118,39	100%

Sumber: Kementerian Keuangan

Porsi kepemilikan Asing di SBN Rupiah yang dapat diperdagangkan sejak tahun 2002 relatif berfluktuatif namun cenderung meningkat. Tingginya kepemilikan asing di pasar SBN saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah. Untuk itu, pemerintah berupaya mengembangkan pasar SBN dan basis investor dalam negeri guna memitigasi risiko yang dapat timbul ketika terjadi *capital outflow*. Upaya inipun mulai menunjukkan hasil dimana terdapat penurunan porsi kepemilikan asing menjadi sebesar 38,4% pada April 2019.

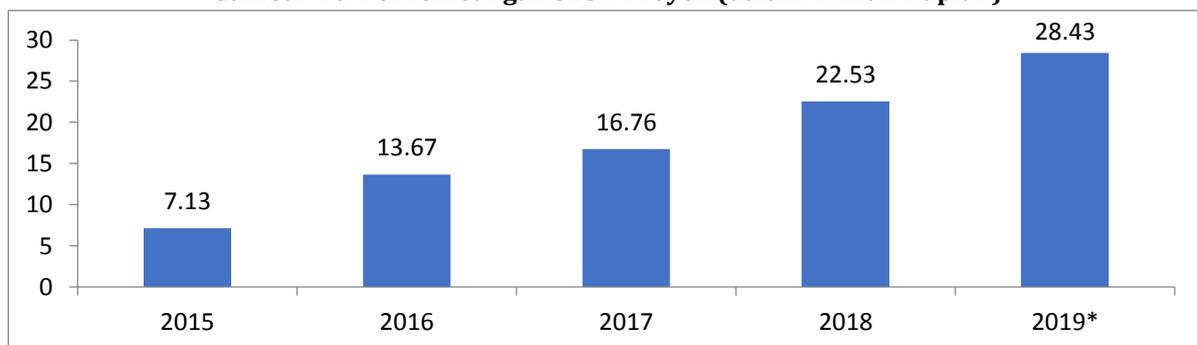
Gambar 15. Porsi Kepemilikan Asing di SBN Rupiah Dapat Diperdagangkan



Sumber: Bloomberg, CEIC, DJPPR per 29 April 2019

SBSN proyek merupakan salah satu instrumen utang yang digunakan langsung (*earmarked*) untuk pembangunan proyek terutama infrastruktur. SBSN proyek memastikan bahwa utang yang dilakukan oleh Pemerintah digunakan secara produktif, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah SBSN terus meningkat sampai dengan Maret 2019 menjadi sebesar Rp28,43 triliun (gambar 16). Peningkatan ini diikuti baik dari nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, jumlah proyek yang dibangun, maupun sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan. K/L yang menjadi pemrakarsa proyek SBSN juga semakin banyak, dari semula pada tahun 2013 hanya 1 K/L, di tahun 2019 ini sudah meningkat menjadi 15 unit eselon I dari 7 K/L.

Gambar 16. Perkembangan SBSN Proyek (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah pembiayaan infrastruktur melalui SBSN dari tahun 2013 hingga 2019 mencapai sebesar Rp90,91 triliun dengan jumlah proyek mencapai 2.211 proyek yang tersebar di 34 provinsi. Adapun proyek dalam pembiayaan SBSN meliputi sektor-sektor antara lain:

- (1) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa infrastruktur jalan, jembatan, dan Sumber Daya Air sebanyak 933 proyek;
- (2) Perhubungan berupa Infrastruktur Perkeretapian, Bandara, Pelabuhan, dan Terminal sebanyak 59 proyek;
- (3) Agama berupa asrama haji, KUA, Jaminan Produk Halal sebanyak 898 proyek;
- (4) Pendidikan berupa PTN, PTKIN, dan Madrasah sebanyak 305 proyek;
- (5) Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Konservasi SDA sebanyak 9 proyek;
- (6) Ilmu Pengetahuan berupa Laboratorium Riset dan Teknologi Standar Internasional) sebanyak 7 proyek.

Gambar 17. Perkembangan SBSN Proyek Menurut Kementerian/Lembaga (dalam Triliun Rupiah)

Kementerian/Lembaga	2015	2016	2017	2018	2019*
Kementerian Perhubungan	2,92	4,98	7,54	7,0	8,0
Kementerian PUPR	3,51	7,23	7,43	7,0	16,8
Kementerian Agama	0,675	1,47	1,79	2,21	2,7
Kementerian LH dan Kehutanan	-	-	-	0,51	0,1
Kemenristek	-	-	-	0,315	0,5
BSN	-	-	-	0,05	0,05
LIPI	-	-	-	0,120	0,2
Jumlah	7,13	13,67	16,76	22,53	28,43

Sumber: Kementerian Keuangan

C.2. PINJAMAN

Sampai dengan Maret 2019, Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri telah mencapai Rp791,19 triliun yang didominasi oleh Pinjaman Luar Negeri atau setara 99% dari total pinjaman. Pinjaman Luar Negeri pada tahun 2019 adalah untuk membiayai proyek serta untuk menutup defisit anggaran secara umum.

Gambar 18. Perkembangan Pinjaman Tahun 2014 - 2019 (dalam Triliun Rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019*
Pinjaman Luar Negeri	751,04	729,71	740,39	799,04	784,05
Bilateral	340,63	315,07	314,46	330,95	322,26
Multilateral	360,04	368,92	381,65	425,49	420,61
Komersial	50,20	45,61	43,12	42,60	41,18
Suppliers	0,17	0,10	1,17	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	4,08	5,13	5,78	6,58	7,13
Jumlah	755,12	734,85	746,17	805,62	791,19

Sumber: Kementerian Keuangan

Sampai dengan Maret 2019, belum tercatat transaksi pada postur Pinjaman Dalam Negeri. Sementara pembiayaan melalui Pinjaman Luar Negeri sampai Maret 2019 telah mencapai 26,41% dari APBN dimana masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Gambar 19. Posisi Pinjaman Tahun 2018 – 2019 (dalam Triliun Rupiah)

	APBN 2018	Realisasi		APBN 2019	Realisasi	
		Maret 2018	% APBN		Maret 2019	% APBN
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3,14	0,0	0,0%	482,4	0,0	0,0%
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,50	0,0	0,0%	1.956,4	0,0	0,0%
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1,37)	0,0	0,0%	(1,47)	0,0	0,0%
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18,44)	4,41	-23,90%	(30,19)	(7.972,9)	-26,41%
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	51,35	15,75	30,67%	60,28	8,48	14,07%
Pembayaran Pokok Pinjaman LN	(69,79)	(11,34)	16,25%	(90,47)	(16,45)	18,19%
Jumlah	(15,30)	4,41	-28,80%	(29,71)	(7,97)	-26,84%

Sumber: Kementerian Keuangan

Komposisi belanja utang dirinci menjadi dua komponen, yakni Belanja Bunga Utang Dalam Negeri (UDN) dan Bunga Utang Luar Negeri (ULN) sebesar Rp66,13 triliun lebih tinggi secara signifikan bila dibandingkan dengan pembayaran bunga ULN sebesar Rp4,45 triliun (Gambar 20). Sejalan dengan realisasi pembiayaan utang netto, dimana porsi penambahan utang netto yang berasal dari instrumen SBN (Rp185,83 triliun) lebih besar bila dibandingkan realisasi pinjaman netto (minus Rp7,97 triliun), sesuai dengan strategi pembiayaan pemerintah untuk meningkatkan dan menjadikan kontribusi masyarakat domestik serta perluasan pasar domestik sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Gambar 20. Realisasi Belanja Bunga Utang dan Pembiayaan Utang

No.	Uraian	APBN 2019	Realisasi (dalam miliar rupiah)			
			s.d. tgl 31 Maret 2019		Sisa Pagu 2019	s.d. tgl 31 Maret 2018
			Nominal	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)	(6)	
A.	Belanja Utang	275.885,3	70.576,0	25,6	205.309,3	68.464,0
1	Bunga Utang Dalam Negeri	255.844,9	66.129,4	25,8	189.715,5	65.088,8
2	Bunga Utang Luar Negeri	20.040,4	4.446,6	22,2	15.593,8	3.375,2
B.	Pembiayaan Utang	359.250,6	177.860,1	49,5	181.390,5	150.603,4
I	Surat Berharga Negara (Neto)	388.957,9	185.833,0	47,8	203.124,9	145.423,0
II	Pinjaman (Neto)	(29.707,3)	(7.972,9)	26,8	(21.734,4)	5.180,4
1.	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482,5	-	-	482,5	-
A.	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.956,4	-	-	1.956,4	-
B.	Pembayaran Cicilan Pokok PDN	(1.473,9)	-	-	(1.473,9)	-
2.	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189,7)	(7.972,9)	26,4	(22.216,8)	5.180,4
A.	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	60.280,5	8.480,3	14,1	51.800,2	16.521,0
i.	Pinjaman Tunai	30.000,0	7.036,0	23,5	22.964,0	12.664,8
ii.	Pinjaman Kegiatan	30.280,5	1.444,3	4,8	28.836,2	3.856,2
B.	Pembayaran Cicilan Pokok PLN	(90.470,2)	(16.453,2)	18,2	(74.017,0)	(11.340,6)

Sumber: Kementerian Keuangan

Sampai dengan Maret 2019, total utang pemerintah Indonesia berjumlah Rp4.567,31 triliun, terutama didominasi oleh SBN, khususnya SBN berdenominasi rupiah. Sedangkan. Pinjaman didominasi oleh Pinjaman Luar Negeri yakni sebesar 99.09% (Gambar 21)

Gambar 21. Perkembangan dan Realisasi Utang Pemerintah, 2010 - 2019 (Triliun Rp)

	2015	2016	2017		2018		2019*	
Total Utang Pemerintah Pusat	3,165.13	3,515.46	3,938,70	100%	4.418,30	100,00%	4.567,31	100,00%
a. Pinjaman	755.12	734.85	744	18,90%	805,62	18,23%	791,19	17,32%
1. Pinjaman Luar Negeri	751.04	729.71	738,4	18,70%	799,04	18,08%	784,05	17,17%
Bilateral	340.63	315.07	313,7	8,00%	330,95	7,49%	322,26	7,06%
Multilateral	360.04	368.92	381,2	9,70%	425,49	9,63%	420,61	9,21%
Internasional	50.20	45.61	42,6	1,10%	42,6	0,96%	41,18	0,90%
Suppliers (Pinjaman Kredit Ekspor)	0.17	0.10	1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	4.08	5.13	5,5	0,10%	6,57	0,15%	7,13	0,16%
b. Surat Berharga Negara	2,410.01	2,780.61	3.194,70	81,10%	3.612,69	81,77%	3.776,12	82,68%
Denominasi Valas	658.92	766.58	853,6	21,70%	1.011,05	22,88%	1.014,94	22,22%
Denominasi Rupiah	1,751.09	2,014.03	2.341,10	59,40%	2.601,63	58,88%	2.761,18	60,46%

Sumber: Profil Utang Dan Penjaminan Pemerintah Pusat, APBN Kita

*Sampai Dengan Maret 2019

Besaran utang Pemerintah pada akhir Maret 2019 terdiri atas SBN dengan komposisi 82,68% terhadap total utang (Rp3.776,12 triliun) dan pinjaman dengan komposisi 17,32% terhadap total utang (Rp791,19 triliun). Penerbitan SBN tahun 2019 masih dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek serta refinancing, sementara Pinjaman Luar Negeri tahun 2019 untuk membiayai proyek dan menutup defisit APBN.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id